

ABSTRAK

Zakiyudin Fikri, 20110520093. Analisis Pemberdayaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Bantul (dibawah bimbingan Dr. Dyah Mutiarin, S.IP, M.Si).

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1). Mendeskripsikan dan menganalisis Pemberdayaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bantul, 2). Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pemberdayaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bantul. Untuk mengetahui pemberdayaan dan penataan pedagang kaki lima Kabupaten Bantul. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan model analisis interaktif, yaitu analisis yang bergerak dalam tiga komponen, yaitu (1) Reduksi Data (*reduction*), (2) Sajian Data (*display*) dan (3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing*).

Hasil analisa data yang didapatkan adalah Pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Bantul dilihat belum dilakukan secara optimal. Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bantul hanya berupa penyuluhan dan bantuan tenda dagangan. Selama ini Pemerintah Kabupaten Bantul belum memberikan bantuan modal kepada PKL, namun bantuan tenda yang diberikan selain dapat meningkatkan kualitas layanan juga dapat meningkatkan usaha dari Pedagang yang bersangkutan. Penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Bantul Dinas Perindustrian, perdagangan, dan koperasi sudah melakukan proses penataan dengan dimulai dari pendataan dan pendaftaran pedagang kaki lima sejak tahun 2013, dalam proses pendataan dan pendafaran PKL tersebut Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi juga melibatkan pemerintah desa sebagai aparat pemerintah yang bersentuhan langsung dengan lapisan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan dan penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bantul adalah hambatan berupa kesulitan mengumpulkan PKL dalam upaya memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada para PKL selain itu Pemerintah juga menghadapi penolakan dari para PKL, penolakan dari para PKL ini secara eksplisit ditandai dengan adanya keengganan PKL untuk pindah tempat dari lokasi semula PKL berdagang. Selain itu sumberdaya yang dapat disediakan oleh pemerintah Kabupaten Bantul ternyata masih belum mencukupi kebutuhan dari implementasi kebijakan penataan.